



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Bandung: Dahlan), 1997, Juzke 2.
- A. Djazuli, *FiqhSiyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Ahmad bin Muhammad al-Fayyumî. *al-Mishbah al-Munir*. al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.t. 1986.
- Al Maududi Abu A'la. *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*.Cetakan Pertama. Bandung: Mizan. 1990.
- Al-Mawardi Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Hukum Islam (Al-Ahkam Sulthaniyyah Wa Wilayatud Diniyyah)*. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- AsshiddiqieJimly.*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Budiardjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Dian Rakyat. 1998.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Al-Hikmah Diponegoro. 2011.
- DPRA, *Sejarah DPR*. dari situs: <http://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr/>. Diakses di internet pada tanggal 28 Desember 2017.
- Fauzi Achmad. *Jurnal Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik*. Semarang: UNTAG. 2014.
- Ibn Manzhur. *Lisan al-'Arab*. vol. 6. Beirut: Dar Shadir. 1968.
- Ishak. *Jurnal Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (StudiKasusPeraturan Daerah Tentang Pajak Daerah)*. Tadaluko: Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana. 2013.
- IsraSaldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2013.
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.
- Kaho Josef Riwu.*Otonomi Daerah Di Negara Republic Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Kansil dan Cristine Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Cet. Kedua Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Komisi DPRD, diakses dari website www.edukasippkn.com pada tanggal 31 Maret 2018.
- Kecamatan Rengat Barat Dalam Angka 2017 (BPS Kabupaten Indragiri Hulu). 2017.
- Legowo T.A. *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia: Studidan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Formappi. 2005.
- Marbun B.N. *DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya* Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1992.
- Misdianti dan Kartasapoetra. *Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Cet. Kedua. Jakarta: Bumi Aksara. 1993.
- Radjab Dasril. *Hukum Tata Negara Indonesia* Cet. Ke 2. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Rahardjo Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina. 2002.
- Rais Dhiauddin M. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Rajab Abdul. *Jurnal Fungsi Budgeting Badan Anggaran DPRD Kota dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2012.
- Sarman, Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Cet. Ke 1. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Sani Aditya. *Sejarah DPR* dikutip dari <http://adityasani.wordpress.com/sejarah-dpr>. di akses pada tanggal 29 November 2017.
- Shobahah Nurush. *Jurnal Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Fiqh Siyasah*. Tulung Agung: IAIN. 2017.
- Situmorang Viktor M. dan Cormentya Sitanggang. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Subagyo Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Sunarno Siswanto. *Hukum Pemetintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Supriyadi Dedi. *Perbandingan Fiqh Siyasah (Konsep, Aliran, dan Tokoh-tokoh Politik Islam* Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia. 2007.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sutopo, *Fiqh Siyasah dan Ahlu al-halliwa al-'aqdi*, diakses dari website <https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2015/09/10/77819/fiqh-siyasah-dan-penerapan-ahlu-al-halli-wal-aqdi.html> pada tanggal 24 februari 2018.

Syafiie Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia* Cet. Kedua Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Tim Penyusun Buku Daras, *Panduan Penyusunan Skripsi*, Cet Pertama Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, 2014.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 292.

UPTD Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Dan Transmigrasi Kecamatan Rengat Barat

Wahbah al-Zuhayli. *Ushul al-Fiqh al- Islami*. vol. 1. Dar al-Fikr. 2001.